

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan internasional, aktor memiliki suatu modal kekuatan atau *power* dalam melaksanakan hubungan internasional dengan negara lain untuk mencapai kepentingan nasional. Modal tersebut bisa digunakan untuk membuat pihak lain tertarik untuk berinteraksi, atau mungkin digunakan untuk mengontrol pihak lain tersebut agar bersedia melakukan apa yang diinginkan aktor (De Mesquita 2003). Salah satu bentuk *power* berdasarkan sarana dan penyampaianya yakni *soft power*. Dari *soft power* suatu negara dapat memanfaatkannya sebagai kemampuan dan daya tarik negara tersebut yang berpengaruh secara halus dan persuasif, seperti melalui ideologi yang dianut, budaya masyarakat, prestasi negara, kesuksesan, dll (Henderson 1998).

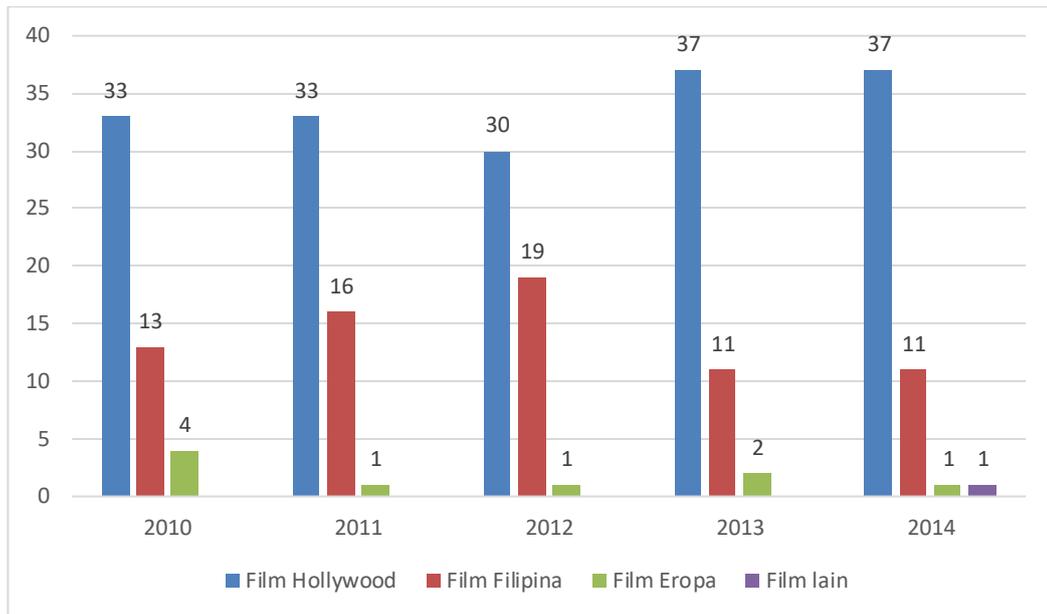
Uni Eropa (untuk selanjutnya disingkat EU) sebagai organisasi regional memandang penting peranan *soft power* dalam aktivitas diplomatiknya. Unsur budaya disini menjadi salah satu andalan EU dalam melakukan pendekatan dengan negara lain (EC 2019). EU menghargai warisan budaya bangsa-bangsa mereka dan menekankan kepentingan untuk senantiasa memelihara nilai-nilainya. Warisan budaya tersebut membentuk identitas bangsa Eropa, termasuk di dalamnya karya seni seperti musik, sastra, dan film (European Union 2019b). Penulis disini memusatkan perhatian pada aspek sinema yang medianya disebut sebagai komponen esensial dalam identitas bangsa Eropa.

Cine Europa merupakan badan organisasi perfilman Eropa yang salah satu kegiatan acaranya adalah pelaksanaan festival film yang diadakan secara rutin setiap tahun di Filipina. Festival filmnya merupakan bagian dari diplomasi budaya oleh EU di Filipina. Kali pertama diadakan tahun 1997 sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan audiovisual EU, berawal dari MEDIA sejak tahun 1991 yang berperan dalam pendanaan industri perfilman Eropa. Festival film *Cine Europa* dilakukan di bawah wewenang EEAS (*European External Action Service*) dan implementasinya diserahkan kepada EUD (*European Union Delegation*) di Filipina yang berkolaborasi dengan kedutaan negara-negara anggota EU dan

institusi budaya resmi lokal. Di Filipina, festival *Cine Europa* dikenal sebagai acara festival film terbesar dan terlama yang diadakan, yakni selama dua minggu di enam kota termasuk Manila (Philippine Primer 2018). Di benua Asia sendiri, festival *Cine Europa* adalah festival film EU terbesar yang didatangi sampai lebih dari 20.000 pengunjung meskipun total *budget*-nya tidak begitu tinggi dibandingkan dengan negara-negara benua Asia lainnya (EC 2015).

Dalam laporan EC (*European Commission*) tahun 2014 yang membahas perfilman Eropa di era digital, ditekankan bahwa EU memanfaatkan sinema sebagai sarana baik dalam perspektif komersil ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebagaimana yang ditekankan dalam kebijakan *Audiovisual Media Services Directive* (AVMSD), sarana audiovisual yang dimaksud mencakup film, televisi, dan video (European Union 2019a). Film dalam hal ini diatur lebih lanjut dalam kebijakan proteksi warisan perfilman bahwa medianya krusial dalam meneruskan warisan budaya di masa sekarang. Dari media sinema, EU menerapkannya dalam bentuk pengadaan festival film. Festivalnya tidak hanya menjadi tempat untuk merilis dan menayangkan film, tetapi ikut menjadi platform pertemuan dan pertukaran budaya para pembuat film mancanegara (Labisch 2017:31). Berdasarkan *survey* laporan EC tahun 2015, setidaknya dari 139 negara tempat EUD terdapat 76 proyek festival film yang dijalankan, termasuk salah satunya festival film *Cine Europa* di Filipina (EC 2015). Untuk *Cine Europa*, festivalnya selalu melibatkan belasan hingga hampir seluruh negara anggota EU, misalnya pada tahun 2015 yang partisipannya mencapai 23 negara anggota (EEAS 2015).

Dari sudut pandang komersil kebijakan audiovisual EU, hendaknya industri perfilman meningkatkan eksploitasi dan kompetisinya baik diantara negara-negara anggota maupun dengan perfilman luar negeri (Herold 2004:6). Hal ini juga diperlihatkan dari tiga dimensi D-CA-T dalam festival film EU, yaitu kegiatannya yang mencakup tujuan *Diplomacy*, *Culture and Audiovisual*, dan *Trade*. Pada dimensi *Trade*, tujuan festival yakni mempromosikan produk audiovisual ke kalangan masyarakat yang lebih luas untuk meningkatkan *marketshare* film-film Eropa (EC 2015:7).



Sumber: Box Office Mojo 2019

Grafik 1.1 Top 50 Film Terlaris di Filipina Tahun 2010-2014 (dalam jumlah)

Di sisi lain, perlu diketahui bahwa film terlaris di Filipina mayoritas berasal dari Hollywood AS (Amerika Serikat) dan film-film lokal Filipina sendiri. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yang berisikan data dari situs Box Office Mojo tentang laporan tahunan mereka perihal film-film terlaris di Filipina yang merefleksikan proporsi *marketshare* perfilman di Filipina. Dapat diamati film-film Hollywood AS selalu mendominasi 50 peringkat teratas di bioskop Filipina. Diikuti dengan belasan film lokal dan segelintir film-film Eropa (Box Office Mojo 2019).

Di tahun 2018, Duta Besar Uni Eropa di Filipina Franz Jessen mengatakan bahwa festival film *Cine Europa* adalah salah satu cara paling efektif bagi negara-negara EU untuk mendekatkan diri dengan Filipina (British Council 2018). Festival film *Cine Europa* dalam hal ini adalah festival film yang secara resmi dilaksanakan oleh negara-negara EU. Film-film yang ditayangkan pun mendapatkan dana khusus dari masing-masing pemerintah negara asal pembuat filmnya, seperti *Nordisk Film & TV Fond* yang didukung oleh dewan Menteri negara-negara Nordik - Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia (Jensen

2016), *Trentino Film Commission* dari Italia (Vittoria 2014), dan *Luxembourg Film Fund* dari Luxembourg (Abbatecianni 2019).

Identitas dan nilai-nilai EU memainkan peranan signifikan dalam penelitian ini, dan penulis menggarisbawahi adanya motif lain lebih dari sekadar penyebaran dan pengenalan budaya oleh kebijakan EU. Dari data pendapatan film di Filipina pada gambar 1.1 juga dapat ditarik bahwa ternyata motif dari sektor komersil tidak sesuai dengan realita dan kondisi yang ada. Besarnya festival film *Cine Europa* masih belum sanggup membawakan pengaruh signifikan dari segi pendapatan bagi film Eropa di Filipina dan bersaing dengan film Hollywood AS, namun EU masih tetap melaksanakan festival setiap tahunnya hingga sekarang. Dalam penelitian ini diselidiki lebih lanjut mengenai motif utama penyelenggaraan festival *Cine Europa* di Filipina oleh EU.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diamati bahwa festival film *Cine Europa* di Filipina tidak berdampak signifikan pada tujuan komersil kebijakan audiovisual EU karena film-film Eropa masih tidak begitu laris di Filipina. Maka dari itu, rumusan masalah yang ditanyakan pada penelitian adalah lantas mengapa EU tetap secara konsisten mengadakan diplomasi budaya festival film *Cine Europa* setiap tahunnya di Filipina?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari tahu dan menjelaskan penyebab dilaksanakannya diplomasi budaya yang dilakukan EU di Filipina melalui festival film tahunan *Cine Europa*.

1.4 Tinjauan Pustaka

Penelitian oleh Camille Labisch (2017) mencari tahu tentang fenomena film festival yang menurutnya dapat disebut sebagai bentuk diplomasi budaya. Kasus yang diangkat Labisch adalah film festival Turki-Jerman di Nuremberg sejak tahun 1992. Festival film ini lahir berkat inisiatif imigran Turki yang ingin

mendekatkan hubungan bersama dengan rakyat Jerman melalui film, sekaligus memperkenalkan budaya mereka serta ikut berusaha mengenal budaya masyarakat Jerman. Labisch mencari tahu kontribusi festival film ini terhadap hubungan bilateral Turki dan Jerman. Dari fenomena itu Labisch. Tulisan menunjukkan adanya kaitan pengaruh meningkatnya diaspora imigran Turki di negara Jerman sehingga Labisch berpandangan bahwa dapat ditemukan hubungan perspektif dinamika imigran dan festival film. Labisch menegaskan bahwa dalam pelaksanaan festival film, terdapat tujuan lebih daripada sekadar diplomasi budaya (Labisch 2017:38).

Irina Herrschner (2016) menggunakan istilah diplomasi sinematik dalam tulisannya yang mengangkat studi kasus peranan festival film Jerman di Melbourne, Australia. Pemerintah Jerman menjunjung tinggi media film dan acara festival film sebagai bagian dari kerangka kerja diplomasi budaya negara. Diplomasi sinematik melalui festival film berbeda dari diplomasi budaya biasa karena menitikberatkan pada penggunaan film untuk membangun dialog antarbudaya atau *Kulturaustausch* (Herrschner 2016:123).

Berikutnya pada tulisan Enverga dan Tangco (2017) yang meneliti kasus yang sama dengan penulis tentang festival film *Cine Europa* yang mereka sebut sebagai kegiatan diplomasi budaya unik, dimana aktornya merupakan organisasi internasional yang mengarahkan kepentingan bersama menjalin hubungan kolaboratif dengan aktor negara tunggal. Enverga dan Tangco mencari tahu apa saja sebenarnya pertimbangan negara-negara anggota EU yang mempengaruhi keaktifan mereka dalam berpartisipasi di festival film *Cine Europa*. Tulisan mereka lebih mengarah pada intrik lingkungan kerja dari festival film *Cine Europa* dengan mewawancarai beberapa agen dan pejabat EUD yang terlibat dalam proposal kegiatan dan pelaksanaannya.

Sarana audiovisual sebagai komponen diplomasi budaya diteliti oleh Iva Rachmawati (2016) yang mengangkat kasus maraknya K-Pop berkat fenomena *Korean Wave* atau *Hallyu Wave*, yakni fenomena budaya pop Korea yang mengalami penyebaran melalui media ke negara-negara lain. Kepopulerannya melalui musik, film, dan drama Korea menjadi pembentuk citra Korea di

masyarakat global. *Korean Wave* menjadi industri kreatif yang ditujukan supaya Korea Selatan mampu lepas dari dampak resesi ekonomi Asia tahun 1997. Namun di balik kesuksesannya di Asia, K-Pop ternyata masih mengalami kesulitan untuk menembus pasar masyarakat Eropa dan Amerika. Menggunakan teori konstruktivisme, Rachmawati memandang hal ini dikarenakan adanya perbedaan nilai budaya yang memengaruhi selera atas produk kesenian dan hiburan (Rachmawati 2016:134). Rachmawati pun menuliskan bahwa *Korean Wave* sejatinya bukanlah strategi diplomasi yang sengaja didesain untuk kepentingan tersebut. Diplomasi budaya ini didominasi kegiatan pertunjukan dan hiburan yang berbeda dari diplomasi budaya EU, dimana pemerintah Korea lebih banyak bergantung pada sektor swasta yang mana menjadi salah satu alasan penyebab kesulitannya (Rachmawati 2016:133).

Padanan *Korean Wave* di negara lain dapat pula diamati di India melalui audiovisual film Bollywood. Dari penelitian Lakshmi N. Tirumala (2009) dapat dipelajari bahwa film Bollywood mempengaruhi konstruksi identitas orang-orang India yang bertempat tinggal di AS. Tirumala membaginya dalam lima proses. Pertama adalah tahap representasi untuk membentuk arti dan wujud sehingga film Bollywood yang menampilkan visual dan bahasa memainkan peran dominan di dalamnya. Selanjutnya tahap identitas untuk mencari tahu identifikasi dan relatibilitas nilai-nilai yang akan disampaikan. Kemudian tahap produksi untuk menentukan target audiens dan cara yang sesuai untuk mengemas dan menyampaikan pesan. Lalu tahap konsumsi dimana pesan-pesan tersebut diinterpretasikan oleh konsumen. Tahap akhir pada regulasi yang mengamati bagaimana pesan kultural mempengaruhi konsumen dalam kehidupan sehari-harinya (Tirumala 2009:7).

Mary Einbinder (2013) dalam tulisannya meneliti diplomasi budaya melalui bentuk festival musik *West-Eastern Divan Orchestra* yang diyakini dapat menjembatani dialog terbuka antara Israel-Palestina dan peranan aktor non negara di dalamnya. Einbinder berpendapat bahwa teori konstruktivis menjadi teori yang cocok dalam penelitiannya. Hal ini dipertimbangkan dari konstruktivisme yang memang memiliki pusat perhatian pada hubungan antarkesadaran manusia.

Platform struktur internasional dan budaya dasarnya merupakan konstruksi sosial sehingga ide, pemikiran, keyakinan, dan diskursusnya bisa bertransformasi. Dari sinilah menurut Enbender musik dan karya seni lainnya adalah bahasa universal yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan mencapai kesalingpahaman (Einbinder 2013:49).

Terkait diplomasi budaya EU, Anna Herold (2004) mengamati adanya dua tujuan inheren kebijakan audiovisual yang menurutnya sulit untuk berjalan beriringan, yakni tujuan kreatif untuk menjaga keberlangsungan keberagaman budaya di Eropa dan tujuan komersil untuk meningkatkan potensi ekonomi perfilman. Herold berpendapat bahwa keduanya kontras dan bahkan terbilang hipokritis. Namun Herold dalam penelitiannya hanya mengamati audiovisual film semata tanpa ikut menilai bentuk-bentuk pelaksanaan lainnya dalam penayangan film.

Dari literatur-literatur di atas menunjukkan bahwa sarana audiovisual diterapkan berbagai negara sebagai bentuk upaya diplomasi budaya. Mulai dari musik, film, dan televisi, memperlihatkan bahwa penggunaannya dilakukan oleh negara-negara tersebut untuk membentuk imej bagi target diplomasinya dan adapula untuk memperkenalkan identitas dan budaya bangsa negara. Dari tinjauan tersebut, kasus festival film *Cine Europa* di tulisan ini berbeda pada aspek bahwa pelaksanaan diplomasi budayanya merupakan kegiatan diplomasi oleh sebuah organisasi kawasan yang ditujukan kepada sebuah negara. Festival film *Cine Europa* juga merupakan satu-satunya festival film yang demikian di Negara Filipina. Penulis mengambil poin pula bahwa teori yang tepat untuk menganalisis kasus dalam tulisan ini adalah teori konstruktivisme.

1.5. Kerangka Pemikiran

Teori Konstruktivisme: Behavioural Norms

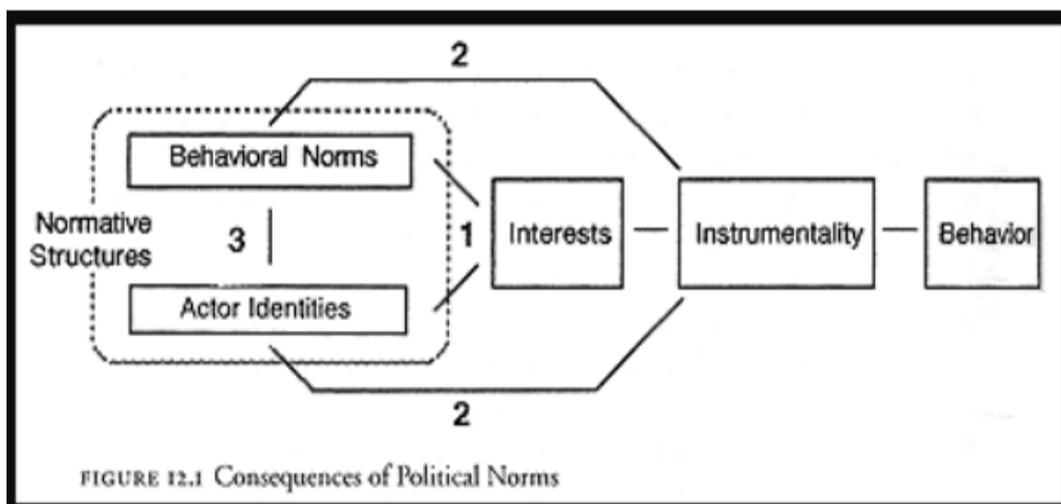
Sarana audiovisual kerap diterapkan berbagai negara sebagai bentuk upaya diplomasi budaya. Mulai dari musik, film, dan televisi, memperlihatkan bahwa penggunaannya dilakukan oleh negara-negara tersebut untuk membentuk imej bagi target diplomasinya dan adapula sebagai pengenalan identitas bangsa negara

tersebut. Dari sini kerangka pemikiran yang digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah mengambil teori konstruktivisme yang berbasis identitas dan norma. Sebagai teori alternatif positivistik adalah konstruktivisme salah satunya yang mengadopsi teori sosiologi, dan merupakan salah satu teori termuda HI yang berusaha menjelaskan bahwa dunia internasional pada dasarnya merupakan suatu konstruksi manusia. Teori konstruktivisme tergolong teori yang cukup baru, mulai muncul pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an (Walt 1998 dalam Weber 2010:62). Konstruktivisme yang pemikirannya berangkat dari sosiologi memberikan analisis bahwa kepentingan negara didasari pada bagaimana aktor-aktornya menghadapi dan memanfaatkan faktor-faktor kultural. Dalam konstruktivisme ditegaskan bahwa kondisi sosial dari hubungan internasional kurang tepat untuk dijelaskan melalui hukum-hukum pakem berdasarkan penelitian ilmiah dan dijelaskan dalam teori ilmiah, dikarenakan manusia merupakan subjek utama di dalamnya. Kaum konstruktivis meyakini bahwa dunia sosial sejatinya adalah wilayah yang bersifat intersubjektif, yakni dunia sosial yang dibuat dan dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu (Jackson & Sorensen 2013:307). Oleh karena itu teori ini memusatkan aspek norma, institusi, identitas, dan budaya sebagai pembentuk tatanan internasional dan penggerak hubungan antarnegara.

Dalam perihal anarki yang sering dianggap sebagai kondisi alami dunia internasional. Kaum konstruktivis berpendapat bahwa dunia ini bersifat kontekstual, sehingga tindakan-tindakan manusia-lah yang mengonstruksi dunia ini. Jika negara berperilaku secara konfliktual dengan negara lain, maka kondisi alami yang akan terjadi adalah anarki internasional yang konfliktual. Sebaliknya jika negara berperilaku secara kooperatif dengan negara lain, maka yang akan terjadi adalah anarki internasional yang kooperatif. Pencerahannya disini adalah bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya kondisi alami anarki internasional karena negara-negara-lah yang menentukan bagaimana kategori “*nature*” dari anarki internasional itu sendiri. Alexander Wendt menyebutnya “*Anarchy is what states make of it*”. Apa yang dilakukan negara tergantung dari identitas dan

kepentingan negara tersebut, dan identitas dan kepentingan jarang sekali tidak berubah (Wendt 1992 dalam Weber 2010:62).

Paul Kowert dan Jeffrey Legro (1996) menegaskan bahwa teori Hubungan Internasional tidak bisa mengabaikan norma yang ada, bahwa norma sebenarnya dapat memengaruhi kepentingan, keyakinan, dan perilaku aktor dalam politik internasional. Aktor politik dan hubungannya dengan aktor lain ditentukan oleh preskriptif identitasnya. Membahas tentang norma dalam konstruktivisme, terdapat preskriptif perilaku atau *behavioural norms* guna melaksanakan dan menunjukkan identitas tersebut. Dari teori *behavioural norms*, Kowert dan Legro menjelaskan bahwa hubungan internasional sulit untuk mengabaikan norma yang ada dikarenakan keberadaannya membentuk tendensi kerjasama dan konflik.



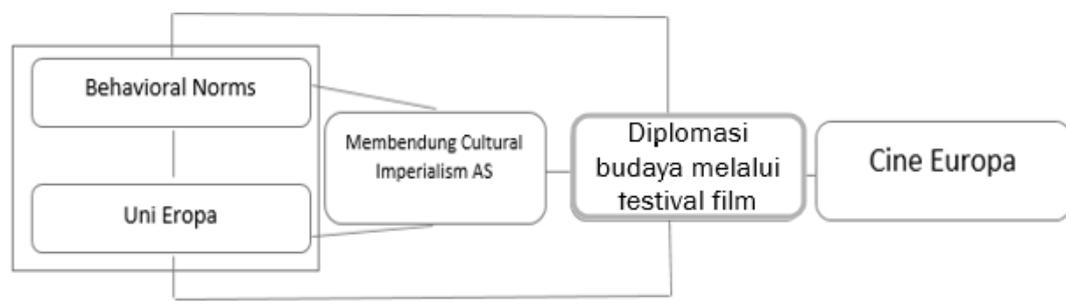
Sumber: Kowert & Legro 1996

Gambar 1.1 Hubungan Struktur Normatif dan Perilaku Negara

Menurut Kowert dan Legro, perumusan kebijakan luar negeri menitikberatkan pada bagaimana: (1) dampak norma terhadap kepentingan, tentang bagaimana ditentukan oleh norma perilaku dan identitas aktor; (2) struktur normatif yang ada dari norma perilaku dan identitas aktor membentuk instrumen sebagai cara pelaksanaannya, dan; (3) dan dampak norma terhadap struktur normatif dan identitas aktor. Sumber dari norma itu sendiri dapat ditelaah dari

proses sosial, yakni bahwa norma terbentuk sebagai hasil generalisasi dari interaksi manusia, organisasi, negara, dan aktor politik lainnya. Proses sosial yang demikian bisa menjelaskan bagaimana identitas negara-negara dalam suatu organisasi mengembangkan identitas bersama melalui adanya *transgovernmental networks* yang menjadi fasilitas kebijakan berbagi kesepahaman kolektif, sebagaimana contohnya dalam negara-negara NATO. Konstruktivis Martha Finnemore ikut menyetujui hal ini, yaitu bahwa mekanisme kebijakan organisasi internasional berperan penting dalam menyalurkan norma-norma yang dapat membentuk identitas dan kepentingan negara-negara anggotanya (Finnemore & Sikkink 1998:888).

Motif dari EU untuk konsisten mengadakan festival film *Cine Europa* di Filipina bisa dijelaskan dalam teori konstruktivis *behavioural norms*. Kebijakan audiovisual EU menekankan pada diadakannya diplomasi budaya. Festival film sesuai dalam kebijakan audiovisual EU dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi budaya tersebut untuk mempererat hubungan dengan negara-negara EUD. Namun dalam sektor perfilman, sudah tidak terhindarkan bagi film Eropa untuk berhadapan dengan film Hollywood AS. Larisnya film Hollywood menandakan bahwa nilai-nilai dan budaya bangsa AS menjadi lebih mudah untuk diperkenalkan dan hal ini menjadikan AS sebagai pesaing terbesar EU dalam mengerahkan *soft power*-nya di Filipina. Adapun penulis seperti Sofia Kitsou yang menyebutkan bahwa di masa globalisasi kini tingkat pengaruh budaya oleh AS skalanya dapat disebut mencapai *cultural imperialism* (Kitsou 2013:27). Oleh karena itu, penulis berargumen bahwa kepentingan festival film *Cine Europa* sebagai upaya membendung pengaruh budaya AS di Filipina.



Gambar 1.2 Struktur Normatif Uni Eropa dan Festival Film *Cine Europa*

Festival Film sebagai Diplomasi Budaya

Bound et al. (2007) menuliskan bahwa dalam era paska Perang Dingin, diplomasi budaya telah semakin menjadi penting dan bervariasi dalam penerapannya, sementara diplomasi tradisional dan kekuatan militer semakin terbatas. Aspek budaya mampu membantu masyarakat dalam membangun konstruksi bangsa dan memproyeksikan identitas nasional mereka. Namun Bound et al. juga menitikberatkan istilah “diplomasi budaya” yang tidak mudah untuk didefinisikan bentuk pelaksanaannya (Bound et al. 2007). Dalam hal ini penulis memandang berdasarkan kebijakan audiovisual EU, bahwa mereka menjadikan penampilan budaya bangsa Eropa dengan menggunakan sarana film melalui pengadaan festival film. Festival film mulai ada sejak periode 1960-an dan awalnya merupakan fenomena *event* di Eropa yang memusatkan agenda untuk mengimbangi popularitas film-film Hollywood AS (Labisch 2017, Herrschner 2016).

Festival film memberikan pengalaman unik yang menimbulkan adanya *sense of belonging*. Herrschner (2016) menuliskan bahwa festival film berfungsi sebagai mediasi identitas kolektif yang menggabungkan film dengan kegiatan partisipasi dan pengalaman akan perbedaan. Acara ini menyuguhkan audiensnya hasil-hasil karya baru, kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam diskusi tema, nilai-nilai, dan pandangan, dan mengenal budaya-budaya baru. Menurut Herrschner, praktiknya yang distingtif bahkan layak untuk mendapat kategori baru sebagai diplomasi sinematik. Tema utama diplomasi sinematik adalah bahwa film tidak hanya dapat menggambarkan perbedaan budaya, tetapi juga memasukkan tema kemanusiaan yang bermaksud menyetarakan posisi bangsa target festival film (Herrschner 2016:128).

Film ditegaskan dapat membawa pesan simbolik yang kuat dan memiliki pengaruh besar sebagai sarana komunikasi sehingga dalam arena geopolitik, film dapat menjadi alat diplomasi dan politik (Labisch 2017:21). Festival film merupakan acara yang mengintegrasikan politisasi dan ekonomi film sehingga fenomenanya cukup sulit untuk dijauhkan dari praktik diplomasi budaya. Pelaksanaannya berusaha menunjukkan bahwa sinema memiliki bentuk alternatif

lain dari film-film Hollywood dalam penyampaiannya. Karakteristik menonjol dari festival film sebagai diplomasi budaya adalah bagaimana film-filmnya mengundang pelibatan jaringan masyarakat yang luas, kreativitas, nilai-nilai, dan perhatian pada isu-isu sosial relevan (Faragasan 2014).

1.6. Argumen Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengambil tesis argumen bahwa diplomasi budaya EU melalui festival film *Cine Europa* di Filipina memiliki tujuan untuk membendung pengaruh *culture imperialism* film Hollywood pada film Filipina.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Operasionalisasi Konsep

Soft Power dan Diplomasi Budaya Uni Eropa

Roy (1995) menjelaskan dalam bukunya bahwa diplomasi budaya merupakan kegiatan diplomatik dengan menggunakan *soft power* melalui pengiriman delegasi kebudayaan untuk memamerkan keagungan kebudayaan suatu negara dan untuk mempengaruhi pendapat umum negara yang didatangi. Pertukaran kebudayaan menjembatani interaksi negara-negara untuk mengetahui dan memahami pandangan satu sama lain dengan cara yang baik dan nantinya bisa menjadi fondasi hubungan yang kuat dalam mempermudah penanganan masalah-masalah lain.

Soft power EU terbagi dalam empat aspek. Pertama adalah identitas dan budaya Eropa yang tercerminkan dalam motto “*United in Diversity*” dan sebagai model teladan regionalisme. Kedua adalah prinsip EU, berdasarkan Artikel 10A Perjanjian Lisbon yakni demokrasi, hukum, hak asasi manusia universal, rasa hormat akan martabat manusia, kesetaraan dan solidaritas, dan ketaatan terhadap prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Ketiga adalah institusi EU dalam bentuk EEAS di Brussels dan EUD yang berfungsi sebagai sarana diplomatik resmi dan bertanggung jawab akan pelaksanaan diplomasi publik EU. Keempat adalah strategi kebijakan luar negeri EU, berdasarkan Artikel 10A Perjanjian

Lisbon yakni melindungi perdamaian, perdagangan bebas, mendukung keberlanjutan penumpasan kemiskinan, memberikan bantuan kemanusiaan, dan sistem internasional berbasis multilateralisme (Azpiroz 2015:7).

Azpiroz menjelaskan bahwa pola dan sifat diplomasi oleh EU tidaklah seperti AS yang imperialis dan unilateralis, melainkan EU menggarisbawahi persuasi dan kooperasi (Azpiroz 2015). Pendekatan diplomasi budaya EU tidak mengandalkan asumsi adanya kultur yang lebih superior dan kekuatan normatif, melainkan lebih kepada pelibatan melalui dialog konstruktif dalam tingkat setara bersama negara Dunia Ketiga. Sejalan seperti Azpiroz, tulisan ini menyetujui bahwa pendekatan EU yang demikian memiliki keseimbangan dan nilai distingtif yang membedakan dari gaya diplomasi AS yang cenderung memandang budaya sebagai *zero sum power game* (Triandafyllidou & Szucs 2017:2).

Cultural Imperialism oleh Amerika Serikat

AS sebagai negara adidaya tunggal paska Perang Dingin kerap dikenal sebagai penggerak arus globalisasi modern. Sekarang cukup sulit untuk membedakan mana yang disebut sebagai proses globalisasi dan Amerikanisasi karena globalisasi sepertinya menjadi wahana bagi penyebarluasan budaya Amerika di seluruh dunia. Salah satu dampak negatifnya kemudian dapat berimbas pada adanya asimilasi budaya terutama pada negara-negara berkembang (Kitsou 2013). Pengaruh budaya Amerika di Filipina cukup kuat dikarenakan negaranya yang dinyatakan merdeka oleh AS setelah Perang Dunia II dan adanya tingkat diaspora penduduk Filipina yang signifikan di AS (Sison 1994).

Cultural imperialism pada negara-negara Dunia Ketiga melibatkan penetrasi dan dominasi sistematis dalam gaya hidup oleh masyarakat kelas atas bangsa Barat untuk menerapkan nilai-nilai, perilaku, dan identitas mereka. Media massa, publisitas, dan sarana hiburan menjadi sarana yang acap kali dimanfaatkan untuk melakukan penyebarannya di masa modern. James Petras (2000) dalam hal ini bahkan berpendapat bahwa CNN, Disneyland, dan Hollywood terbilang memiliki pengaruh yang jauh lebih besar pada pembentukan identitas daripada agama dan politik.

Pad umumnya, yang dimaksud dengan istilah “*cultural imperialism*” adalah penyebaran global dan dominasi produk-produk budaya AS yang acap kali dinyatakan merepresentasikan bentuk regulasi budaya global dan mengikis identitas nilai dan budaya lokal bangsa negara (Rauschenberger 2003:2). Pada tulisan ini penulis memusatkan komoditas budaya dalam *cultural imperialism* pada produk audiovisual, terutama pasar film global sebagai salah satu sektor yang mendapatkan pengaruh terbesar dalam *cultural imperialism* oleh AS.

1.7.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe eksplanatif. Penulis mencari tahu faktor motif apa yang dipertimbangkan EU untuk mengadakan festival film tahunan di Filipina. Dari hipotesis yang diajukan penulis berusaha menemukan hubungan sebab-akibat antara variabel dan dampaknya sehingga bisa menarik kesimpulan untuk menjelaskan fenomena yang diamati.

1.7.3. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini akan mengambil periode tahun 1989 hingga 2018. Penulis mengambil tahun 1989 yang menandai kali pertama EU menerapkan kebijakan audiovisual, yakni *Television without Frontiers*. Periode yang dipilih hingga tahun 2018 mengikuti kali terakhir festival film *Cine Europa* dilaksanakan di Filipina pada saat penelitian ini dilakukan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah berdasarkan tinjauan pustaka. Data-data dalam tulisan ini bersumber pada data-data sekunder dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel dalam surat kabar, dokumen resmi pemerintah yang dipublikasikan, dan referensi lainnya. Peneliti juga mengambil informasi tambahan seperti dari situs berita daring lokal, video dari akun resmi media sosial, dan media massa lainnya.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Dalam membuktikan hipotesis dan menjawab rumusan masalah, penelitian akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif yang datanya berasal dari fakta-fakta dan kejadian dari berbagai sumber berdasarkan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah. Ditekankan pula dalam teknik ini yaitu interpretasi penulis terhadap sumber-sumber data yang didapat.

1.7.6. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi dalam 5 bab. Bab I adalah pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argument penelitian dan metodologi penelitian. Bab II membahas mengenai landasan identitas aktor EU melalui perkembangan kebijakan audiovisual serta struktur normatif yang terbentuk dari interaksi EU Bersama negara-negara EUD. Bab III menjelaskan tentang aspek *cultural imperialism* melalui film Hollywood oleh AS di Filipina dan bagaimana sikap EU terhadap fenomena tersebut. Bab IV berisikan diplomasi budaya melalui festival film *Cine Europa* sebagai instrumen pelaksanaan kepentingan EU di Filipina. Bab V terakhir adalah kesimpulan penelitian.